

KAJIAN DAMPAK PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI PROVINSI GORONTALO

Wawan K.Tolinggi, Supriyo Imran, Ahmad Fadli

Program Studi Agribisnis Faperta Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango pada bulan Mei-Oktober 2012. Desain Penelitian adalah pendekatan survei dengan menggunakan data sekunder dan primer, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: analisis deskriptif, analisis kelembagaan, analisis *Comparative Performance Index (CPI)* dan analisis LFA (*Logical Framework Analysis*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian yang menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi dapat memberikan penilaian terhadap desa Sukamaju sebagai peringkat pertama dan Desa Batu Keramat peringkat kedua dan Desa Dunggala peringkat ketiga yang merasakan dampak program desa mandiri pangan. Sistem kelembagaan melibatkan kegiatan lintas sektor yang dimulai dari Tim Pangan Desa, Kepala Desa, Camat, Pokja Desa Mapan, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan. Dampak program memberikan manfaat yaitu meningkatkan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan hasilnya yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana dan berkurangnya masyarakat miskin.

Kata kunci : *Dampak , DesaMandiri Pangan, Gorontalo*

ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze and to evaluate the empowerment of the rural poor society to manage and utilize their resources optimally to achieve food self-sufficiency of households and communities. The research is conducted in Bolemo regency, Gorontalo and Bone Bolango regency in May-October 2012. The research design is a survey approach using secondary and primary data, both quantitative and qualitative. Data analysis methods used in this study are: a descriptive analysis, institutional analysis, Comparative Performance Index (CPI) analysis and the analysis of LFA (Logical Framework Analysis) . The analysis shows that the Desa Mandiri Pangan program in the village of Gorontalo Province consists of 4 phases; preparation, growth, development, and self-sufficiency (independency). By using 6 basic evaluations such as instructors, group management, capital, infrastructure, manpower and technology to provide assessment, there are three villages got the impact of Desa Mandiri Pangan Program, they are Sukamaju village in the first rank, the village of Batu Keramat in second rank and third ranked is Dunggala village. In this program, institutional system is involving cross-sector activities that starts from Food Village Team, Head of village, Head of sub district, working group in a village, Agency/Department/Office /Work Unit for Food Security and Food Security Council. The impact of this program provides benefits that improve food and nutrition, improve social welfare and employment. In addition, this program provides the availability of capital, infrastructure and a decreased of the poor.

Keywords : *Impact, Desa Mandiri Pangan, Gorontalo*

PENDAHULUAN

Kebijakan dibidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2010), pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Hal ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganeekaragaman pangan

sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

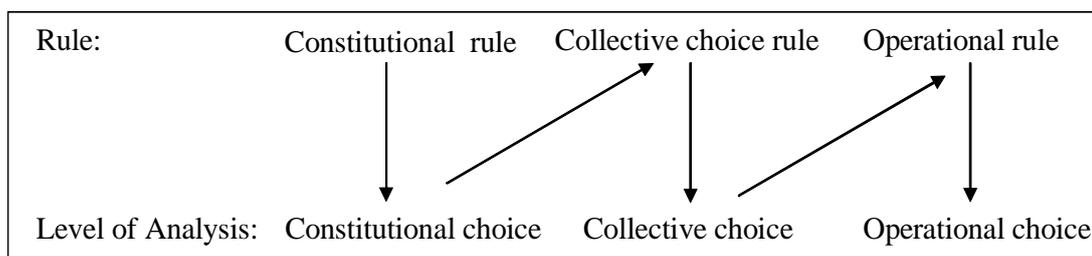
Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan melaksanakan program Desa Mandiri Pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada implementasi program. Untuk mengukur keberhasilan program desa mandiri pangan, maka sangat penting untuk melakukan analisis mengenai dampak desa mandiri pangan. Untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Tujuan program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2011). Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendampingan dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2006, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta tercapainya kemandirian masyarakat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah sejauhmana efektivitas pelaksanaan dari program desa mandiri pangan yang sudah dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Penentuan Desa Mandiri Pangan (Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung, melalui *focus group discussion* (FGD), wawancara dan pengisian kuesioner dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian serta informasi dan studi literatur yang mendukung dari berbagai instansi terkait.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa alat analisis yaitu: 1) analisis deskriptif, 2) analisis kelembagaan yaitu dengan indikator penting untuk melihat mekanisme pembentukan dan operasional kelembagaan lokal merujuk kepada Ostrom (1990) yang skemanya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Level Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya

3) analisis *Comparative Performance Index* (CPI) dengan Formula yang digunakan dalam teknik CPI adalah sebagai berikut :

$$A_{ij} = X_{ij} (\text{min}) \cdot 100 / X_{ij} (\text{min})$$

$$A_{(i+1,j)} = (X_{(i+1,j)} / X_{ij} (\text{min})) \cdot 100$$

$$I_{ij} = A_{ij} \cdot P_j$$

$$I_i = \sum_{j=1}^n (I_{ij})$$

Keterangan :

A_{ij} : nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

$X_{ij}(\text{min})$: nilai alternatif ke-i pada kriteria awal minimum ke-j

$A_{(i+1,j)}$: nilai alternatif ke-i + 1 pada kriteria ke-j

$X_{(i+1,j)}$: nilai alternatif ke-i + 1 pada kriteria awal ke-j

P_j : bobot kepentingan kriteria ke-j

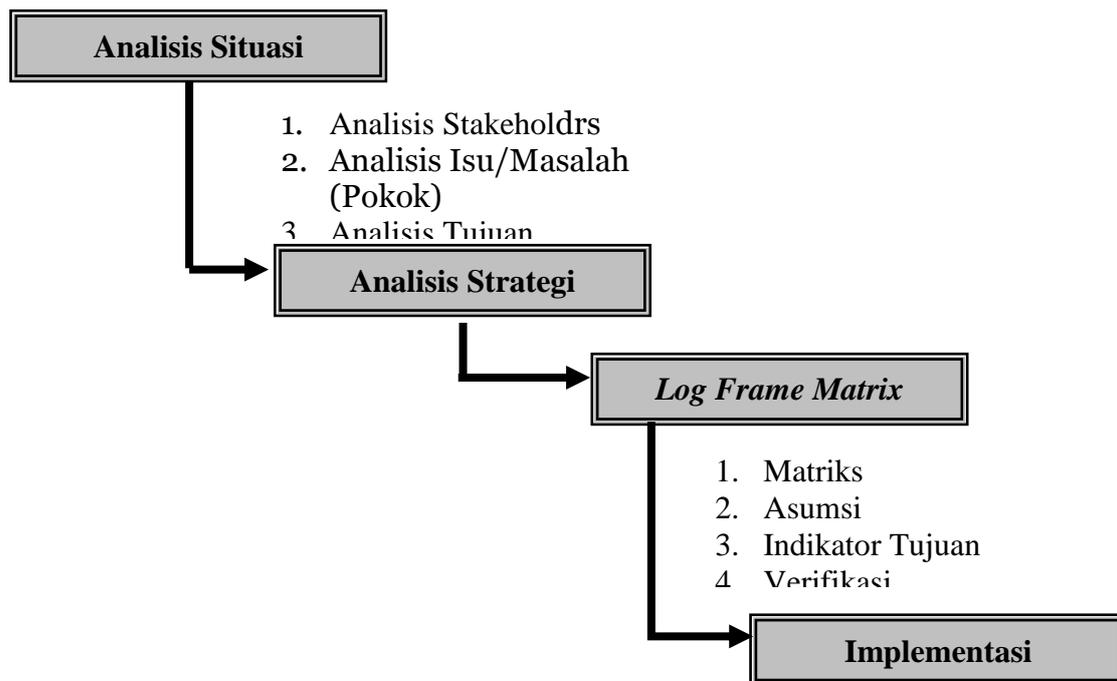
I_{ij} : indeks alternatif ke-I

I_i : indeks gabungan kriteria pada alternatif ke-I

i : 1, 2, 3, ..., n

j : 1, 2, 3, ..., m

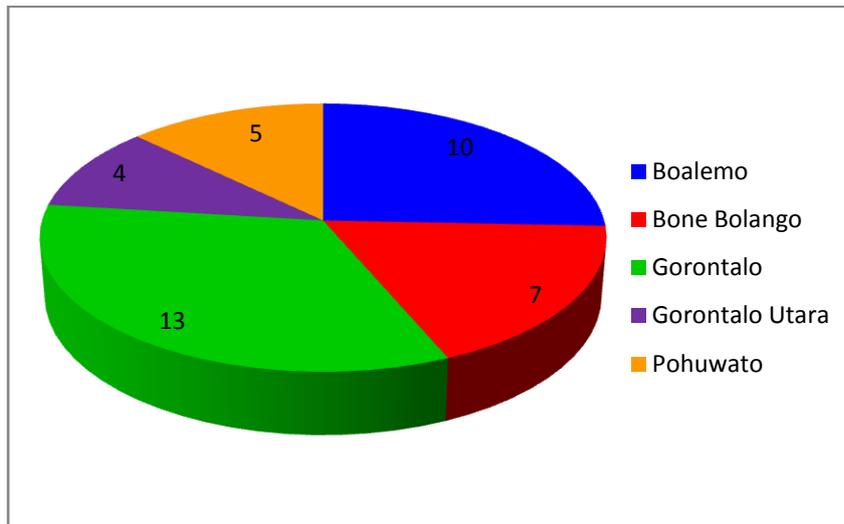
4) LFA (*Logical Framework Analysis*) yang disusun berdasarkan analisis keterkaitan antara tujuan, strategi dan faktor eksternal yang ditetapkan melalui asumsi-asumsi sah tentang program kegiatan yang dievaluasi. Proses ini dapat dilakukan di lapangan.



Gambar 2. Tahap Perencanaan Pengelolaan Berbasis LFA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desa Mandiri Pangan adalah program nasional yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo sudah berlangsung selama 6 tahun, di mulai pada tahun 2006 hingga sekarang ini tahun 2012. Adapun total jumlah Desa Mapan di Provinsi Gorontalo saat ini yaitu sebanyak 39 desa mapan yang tersebar di 5 wilayah Kabupaten antara lain Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah desa Mapan per Kabupaten di Provinsi Gorontalo dari tahun 2006-2012 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Desa Mandiri Pangan Per Kabupaten di Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2012

Berdasarkan Gambar 3 diatas, jumlah Desa Mapan terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 13 desa, Kabupaten Boalemo sebanyak 10 desa dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 7 desa. Hal tersebut didasarkan pada luas wilayah administratif dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar pada setiap daerah Kabupaten tersebut. Sementara itu, jumlah desa mapan di Kabupaten Pohuwato hanya sebanyak 5 desa dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 desa. Hal tersebut didasarkan pada jumlah penduduk miskin yang tidak mencukupi standar jumlah kepala keluarga miskin minimal 30 persen dari total jumlah kepala keluarga miskin di desa tersebut.

Jumlah Program Desa Mandiri Pangan Per Tahun Anggaran di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan data pada Gambar 4, *trend* jumlah Program Desa Mapan per tahun anggaran di Provinsi Gorontalo dari tahun 2006 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya pada tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah Program Desa Mapan tersebut mengalami *stagnasi*. Namun pada tahun 2012 *trend* jumlah desa mapan tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten tersebut menganggap desa-desa yang ada di daerahnya sudah memenuhi kriteria Mapan. Identitas sampel desa mandiri pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Pemilihan sampel lokasi pada 3 desa tersebut diatas dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil rekomendasi dari *focus group discussion* (FGD) dan *snow ball method*. Adapun FGD yang dilakukan yaitu bersama *stakeholder* terkait antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Boalemo, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, program mandiri pangan

pada ketiga desa tersebut sudah berjalan sejak tahun 2009. Sehingga ketiga desa tersebut saat ini telah mengalami berbagai tahapan mulai dari tahap persiapan pada tahun 2009, tahap penumbuhan pada tahun 2010, tahap pengembangan pada tahun 2011 dan memasuki tahap kemandirian pada tahun 2012.

Tabel 1. Sampel Penelitian Desa Mandiri Pangan, Tahun 2012

Desa Mapan	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jenis Usaha Kelompok	Kecamatan/ Kabupaten	Potensi Sumberdaya Alam
Sukamaju	8	20-26	Jual beli sarana produksi pertanian dan beras	Mootilango, Gorontalo	Jagung, Padi, Coklat, Tomat, Cabe, Kunyit, Jahe
Batu Keramat	3	20-40	Penggemukan sapi, jual beli jagung	Paguyaman, Boalemo	Jagung, Kelapa, Sapi
Dunggala	10	10	Kue tradisional, Batu bata, kios, Pembuat minyak kelapa, Tukang, Dagang keliling dan Menjahit.	Tapa, Bone Bolango	Kelapa, Pisang, Jambu mede, Coklat, Ubi, Nenas, Nangka

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, seluruh tahapan pelaksanaan Program Desa Mapan telah dilalui oleh ketiga Desa Mapan yaitu Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat dan Desa Dunggala.

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo

Tahap Pelaksanaan		Desa Mapan		
		Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
Persiapan	Seleksi lokasi	√	√	√

	Sosialisasi program	√	√	√
	Pendampingan	√	√	√
	Penyusunan Data Dasar Desa	√	√	√
	Pelatihan	√	√	√
	Pemberdayaan kelompok afinitas	√	√	√
	Penyusunan rencana pembangunan Desa Mandiri Pangan Partisipatif	√	√	√
	Penumbuhan kelembagaan aparat	√	√	√
Penumbuhan	Penguatan kelembagaan masyarakat	√	√	√
	Pemberdayaan kelembagaan pelayanan	√	√	√
	Lembaga masyarakat	√	√	√
Pengembangan	Lembaga pelayanan masyarakat	X	X	X
	Standarisasi organisasi	√	√	√
Kemandirian	Tertib administrasi	√	√	√

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Meskipun saat ini telah memasuki tahun terakhir dari tahapan kemandirian, namun standarisasi organisasi dan tertib administrasi sudah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok afinitas pada ketiga Desa Mapan tersebut. Adapun yang menjadi catatan penting dalam tahapan pelaksanaan program tersebut yaitu pada tahap pengembangan berupa lembaga pelayanan masyarakat, belum optimal dilakukan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta pengembangan sistem pemantauan, deteksi dan respon dini kerawanan pangan di Desa Mapan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program hanya terfokus pada proses keberlanjutan usaha dan tingkat pengembalian modal usaha.

Identifikasi dampak program desa mapan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan,

sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi. Penggunaan instrumen tersebut berdasarkan tingkat urgensi (kepentingan) dan sangat mudah dalam membantu peneliti untuk mengidentifikasi keberhasilan program desa mapan. Adapun bentuk penilaian terhadap instrumen evaluasi program desa mapan tersebut menggunakan skala likert. Instrumen dasar evaluasi program desa mapan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Instrumen Dasar Evaluasi Program Desa Mapan, Tahun 2012

Instrumen	Desa Mandiri Pangan		
	Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
Instruktur	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
Manajemen Kelompok	Sangat Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
Permodalan	Sangat Baik	Kurang Baik	Baik
Sarana Prasarana	Sangat Lengkap	Sangat Lengkap	Sangat Lengkap
Tenaga Kerja	Sangat Baik	Baik	Baik
Teknologi	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Penilaian dampak program desa mapan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik perbandingan indeks kinerja (*Comparative Performance Index*). Dampak program tersebut dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh instrumen dasar evaluasi (infrastruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi) dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat desa mapan. Adapun matriks awal penilaian dampak program desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Awal Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012

No	Desa Mapan	Kriteria					
		INS	MNK	PMD	SPR	TKR	TEK
1	Sukamaju	5	5	5	5	5	1
2	Batu Keramat	4	3	3	5	4	2
3	Dunggala	5	3	4	5	4	1
Bobot Kriteria		0,20	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan matriks awal penilaian pada Tabel 4 diatas, kriteria instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur dilambangkan dengan INS, manajemen kelompok dilambangkan dengan MNK, permodalan dilambangkan dengan PMD, sarana prasarana dilambangkan dengan SPR, tenaga kerja dilambangkan dengan TKP dan teknologi dilambangkan dengan TEK. Bobot kriteria ditentukan langsung oleh peneliti berdasarkan tingkat kepentingan (urgensi) dari masing-masing

instrumen dasar evaluasi. Sementara itu, angka kriteria dari masing-masing instrumen dasar evaluasi ditentukan dengan menggunakan skala likert. Hasil identifikasi kriteria yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap instrumen dasar evaluasi memiliki *trend* positif (semakin tinggi nilainya semakin baik). Sehingga nilai minimum pada setiap kriteria instrumen dasar evaluasi ditransformasi ke-100, sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi. Matriks Hasil Transformasi Teknik Perbandingan Indeks Kinerja Penilaian Dampak Program Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Hasil Transformasi Teknik Perbandingan Indeks Kinerja Penilaian Dampak Program Desa Mapan, Tahun 2012

No	Desa Mapan	Kriteria					Nilai	Peringkat	
		INS	MNK	PMD	SPR	TKR			TEK
1	Sukamaju	125	166,7	166,7	100	125	100	132,09	1
2	Batu Keramat	100	100	100	100	100	200	115,00	2
3	Dunggala	125	100	133,3	100	100	100	111,66	3
	Bobot Kriteria	0,20	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15		

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Berdasarkan matriks hasil transformasi pada Tabel 5 diatas, didapatkan total nilai indeks kinerja dari masing-masing desa mapan berturut-turut yaitu Desa Sukamaju memiliki nilai indeks kinerja sebesar 132,09, Desa Batu Keramat memiliki nilai indeks kinerja sebesar 115,00 dan Desa Dunggala memiliki nilai indeks kinerja sebesar 111,66. Artinya semakin besar nilai indeks kinerja suatu desa mapan maka semakin besar pula dampak program desa mapan yang dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. Apabila dilihat dari besaran nilai indeks kinerjanya, maka Desa Sukamaju, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mapan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya.

Dalam pelaksanaannya, Program Desa Mandiri Pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian sistem kelembagaan secara efektif baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing level kelembagaan dapat dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6. Fungsi dan Peran Masing-Masing Level Kelembagaan Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo

No	Level Kelembagaan	Tingkat Kewenangan	Fungsi dan Peran
----	-------------------	--------------------	------------------

1	Dewan Ketahanan Pangan	Pusat	Koordinator pelaksana Program Desa Mapan
2	Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan	Pusat, Propinsi, Kabupaten	Penanggung jawab kegiatan dalam Program Aksi Desa Mapan
3	Pokja Desa Mapan	Pusat, Propinsi, Kabupaten	Pelaksana kegiatan Desa Mapan (Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan)
4	Camat	Kecamatan	Koordinator desa pelaksana Program Desa Mapan
5	Kepala Desa	Desa	Penanggung jawab operasional Program Desa Mapan di tingkat desa
6	Tim Pangan Desa	Desa	Aktor penggerak pembangunan ketahanan pangan di tingkat Desa

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Program pengembangan Desa Mapan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul-simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten, propinsi dan pusat.

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel 7, terdapat 5 level kelembagaan yang berperan mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kelembagaan tersebut sangat berperan dalam pelaksanaan Program Desa Mapan di Provinsi Gorontalo. Bahkan tugas dan fungsi dari setiap level kelembagaan sudah sangat jelas dan komprehensif. Jika dilihat dari *operasional rules*, berupa aturan-aturan yang bersifat operasional yang mengatur mengenai *rewards* dan *punishment* masih sangat kurang. Kelompok usaha yang memiliki prestasi yang baik dalam menjalankan usaha masih belum diberikan penghargaan, hanya sanksi yang diberikan bagi kelompok usaha yang terlambat dalam melakukan pengembalian modal. Selanjutnya untuk *collective choice rules* dan *constitutional rules* sudah cukup baik, karena dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan. Selain itu juga yang menjadi catatan penting adalah mekanisme dalam melakukan koordinasi dan sinergisitas antar lembaga masih belum optimal dilaksanakan.

Tabel 7. Kelembagaan Yang Berperan Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Gorontalo

Kelembagaan Yang Berperan	Desa Mapan		
	Sukamaju	Batu Keramat	Dunggala
Tingkat Pusat	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI	Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI
Tingkat Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

	Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Gorontalo
		Badan Pelaksana Penyuluhan	
Tingkat Kabupaten	Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango
	Bidang	Bidang	
Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Mootilango	Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Paguyaman	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kecamatan Tapa
	Tim Pangan Desa	Tim Pangan Desa	Tim Pangan Desa
	Lembaga Keuangan Desa	Lembaga Keuangan Desa	Lembaga Keuangan Desa
Tingkat Desa	Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Tani PKK	Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Tani PKK	Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Tani PKK

Sumber Data : Data Primer (diolah), Tahun 2012

Tahapan-tahapan dalam *logical framework analysis* mengenai “Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo” antara lain yaitu analisis situasi, analisis strategi dan *logical frame matrix*.

a. Analisis Situasi

1. Analisis *Stakeholders*

Pihak-pihak yang berperan sebagai *stakeholders* dalam Program Desa Mandiri Pangan ini adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan lembaga terkait dalam pelaksanaan Program Desa Mapan, merumuskan kebijakan dalam Program Desa Mapan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

- Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah ikut berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi, merumuskan program pengembangan Desa Mapan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Desa Mapan, serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan Program Desa Mapan. Pemerintah daerah yang

dimaksud antara lain Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

- Petani/Kelompok Tani/Kelompok Usaha

Petani/kelompok tani/kelompok usaha merupakan pelaku yang menjadi titik tolak keberhasilan dari Program Desa Mapan. Keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Peningkatan kapasitas para anggota kelompok tersebut dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan oleh instruktur pendamping Program Desa Mapan.

- Bank

Bank merupakan salah satu sumber dana yang dapat menunjang keberlangsungan Program Desa Mapan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman dan memberikan investasi kepada klaster bisnis khususnya kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pertanian.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan dalam keberhasilan Program Desa Mapan. Bersama-sama dengan masyarakat LSM dapat mengawal dan mengawasi jalannya Program Desa Mapan. Selain itu juga, LSM dapat memberikan pelatihan dan pencerdasan kepada petani/kelompok tani/kelompok usaha agar berhasil dalam menjalankan usahanya.

2. Analisis Masalah

Beberapa penyebab permasalahan yang terdapat pada Desa Mapan adalah sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mapan yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya manusia yang juga sangat rendah.
- Kurangnya pelatihan menyebabkan masyarakat Desa Mapan jarang yang memiliki kemampuan khusus (*soft skill*) dalam pengembangan usaha.
- Keterbatasan modal usaha menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha kelompok masyarakat.
- Budaya kerja masyarakat cenderung lambat (malas) menyebabkan produktivitas menjadi rendah.
- Tidak adanya inovasi dan teknologi dalam pengembangan produk menyebabkan usaha kelompok tidak berkembang (stagnasi).
- Mesin dan peralatan produksi yang sangat sederhana menyebabkan kurangnya *value added* produk yang dihasilkan.

- Kegagalan dalam usaha kelompok/gagal panen menyebabkan sulitnya pengembalian modal usaha.

3. Analisis Tujuan

Tujuan utama dari Program Desa Mapan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Artinya, dengan adanya Program Desa Mapan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta tercapainya kemandirian masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan adalah ketersediaan modal usaha, adanya kelompok usaha terpadu, sarana prasarana penunjang semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin.

b. Analisis Strategi

Analisis strategi yang dilakukan dalam program desa mandiri pangan terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*).

1. Kekuatan (*Strength*)

- Wilayah yang luas untuk kegiatan kelompok usaha dan budidaya pertanian
- Potensi sumberdaya alam yang melimpah
- Dukungan pemerintah terhadap Program Desa Mapan
- Ketersediaan modal bagi setiap kelompok tani/kelompok usaha
- Pendampingan dan penyuluhan yang diberikan oleh instruktur

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
- Keterbatasan teknologi
- Kurangnya inovasi
- Strategi pengembangan usaha kurang terencana
- Kurangnya kesadaran dan rasa kepemilikan dalam berusaha

3. Peluang (*Opportunities*)

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- Peluang kerja bagi masyarakat
- Memberdayakan masyarakat sekitar
- Akses jalan dan transportasi semakin mudah

- Sarana prasarana bertambah baik
4. Ancaman (*Threat*)
- Masalah gagal panen
 - Kesulitan dalam pengembalian modal usaha
 - Tidak berlanjutnya usaha
 - Fluktuasi harga
 - Adanya tengkulak/rentenir

c. *Logical Frame Matrix*

Tahap akhir dari penentuan LFA yaitu dengan membuat *logical frame matrix*. Adapun *logical frame matrix* dapat dilihat pada Tabel 8.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian.
2. Identifikasi dampak program desa mapan yang menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi serta penilaian terhadap dampak program desa mapan menunjukkan Desa Sukamaju berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mapan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya.
3. Sistem kelembagaan desa mandiri pangan di Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat, dan Desa Dunggala melibatkan kegiatan lintas sektor yang dimulai dari Tim Pangan Desa, Kepala Desa, Camat, Pokja Desa Mapan, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan
4. Dampak program desa mandiri pangan di Provinsi Gorontalo dilihat dari manfaatnya dapat meningkatkan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan hasil (*outcomes*) yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin, dan *output* (keluaran) yang diperoleh adalah strategi pengembangan usaha yang terencana dan peningkatan produktivitas. Serta kegiatan (*activities*) yang dilakukan adalah dengan

memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif, menjalin kerjasama dengan Universitas, Lembaga Keuangan (Bank) dan swasta.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat disarankan :

1. Program Desa Mandiri Pangan tetap dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan di desa-desa
2. Pemerintah tetap mengawasi pelaksanaan program desa mapan melalui kelembagaan yang baik serta koordinasi dan sinergisitas dari seluruh *stakeholders* terkait
3. Agar kebijakan pemerintah yang mendukung dan berpihak kepada masyarakat dilakukan melalui peningkatan SDM masyarakat desa dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif serta kemudahan akses usaha bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia. 2010. *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014*. Kementerian Pertanian Jakarta.

_____. 2011. *Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2011. Jakarta.

_____. 2011. *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Menuju Gerakan Kemandirian Pangan*. Kementerian Pertanian RI. 2011. Jakarta.

_____. 2012. *Pedoman Umum Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.

Ostrom, E.1990. *Governing of the common. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.